

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA

Sardiansyah Haerul Imam Saillellah¹ Niken Subekti Budi Utami²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam implementasinya untuk memberikan sanksi administratif atau meningkatkan ke tahap penyidikan guna melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana manipulasi pasar di Pasar Modal Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh merupakan data primer yang bersumber pada suatu hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal. Keseluruhan data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggambarkan atau menguraikan hasil yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan teori ataupun aturan yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya harus dinaikkan ke tahap penyidikan dalam melakukan suatu penegakan hukum. Otoritas Jasa Keuangan memiliki dasar pertimbangan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyidikan dan memberikan sanksi administratif ataupun melanjutkan ke tahap penyidikan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi, Nilai Transaksi, dampak dari suatu perbuatan terhadap sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat, ada atau tidaknya suatu penyelesaian kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak memiliki suatu ukuran yang pasti.

Kata kunci: Penegakan hukum, Manipulasi Pasar, Pasar Modal Indonesia

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pidana pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Pidana pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMES OF MARKET MANIPULATION IN INDONESIA CAPITAL MARKET

ABSTRACT

Sardiansyah Haerul Imam Saillellah³ Niken Subekti Budi Utami⁴

This purpose of this legal research is to discover and understand the basis of Financial Services Authority's considerations in its implementation to impose administration sanction or proceed the case into the investigation process with the goal of enforcing the law against the perpetrator of market manipulation in the Indonesian Capital Market.

This legal research uses normative-empirical study, which combines literatures and field research. The primary data was obtained through field research in the form of interview, whilst the secondary data was obtained by literature review, such as laws and regulations, books, articles, and journals. The whole data is processed and analyzed with qualitative method and served in a form of descriptive by describing and elaborating the result obtained from the field with numerous theories of laws implemented in Indonesia, so it could answer the existing problems.

The results show that not all violation of Indonesian Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market and its implementing regulations must be raised to the stage of investigation in carrying out law enforcement. The Financial Services Authority has a basic consideration not to proceed to the investigation stage, to impose administrative sanctions or to proceed to the investigation stage. These considerations include, transaction value, the impact to the capital market system, the settlement of losses arising from a crime. These considerations do not have a definite measure.

Keywords: Law Enforcement, Market Manipulation, Indonesian capital Market

³ Criminal Law student at the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Criminal Law Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.